



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) **INSPEKTORAT KOTA TARAKAN**

TAHUN 2025

+62 851-8319-7547
<http://inspektorat.tarakankota.go.id>
Jln. Sulawesi No. 1, Pamusian

2025



**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Tarakan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2025. Secara khusus, Laporan Kinerja ini memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan tahun ke-1 (satu) pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta selaras dengan pedoman Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lebih dari itu, dokumen ini juga merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan.

Kinerja Inspektorat Kota Tarakan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Merupakan suatu kebanggaan bahwa pada tahun pertama periode Renstra ini, capaian kinerja organisasi berhasil mencapai angka 95,55%.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan pada tahun-tahun selanjutnya. Konsistensi kinerja ini sangat krusial agar pengawalan tata kelola pemerintah kota senantiasa berjalan optimal, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Demikian LKIP Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 ini disusun. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai wujud nyata kinerja Inspektorat Kota Tarakan sekaligus menjadi rujukan strategis untuk evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang

Tarakan, 11 Maret 2026
Inspektur,



Abd. Azis Hasan, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19750212 199501 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Beranjak dari penutup periode Renstra sebelumnya (2021-2024) di mana realisasi capaian kinerja berada pada angka 99,75% (kategori "Sangat Tinggi"), Inspektorat Kota Tarakan terus berakselerasi dan menunjukkan komitmen peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, secara umum Inspektorat Kota Tarakan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan dan sesuai target atas sasaran-sasaran strategisnya. Realisasi capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 berhasil mencapai angka 95,55% dengan kategori "Sangat Tinggi". Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tahun pertama Renstra 2025-2029 telah berjalan melampaui ekspektasi yang ditetapkan.

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja "Istimewa" tersebut tidak lepas dari dukungan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Adapun pagu dan realisasi anggaran Inspektorat Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 15,358,512,705.00 dengan capaian realisasi sebesar **76,12%**

Dengan melihat tren capaian kinerja yang sangat positif ini, evaluasi tetap dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan dengan mengacu pada sasaran dan tujuan RENSTRA Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi di tahun pertama ini ditujukan sebagai landasan dan alat kendali yang krusial bagi upaya perbaikan berkesinambungan, serta optimalisasi peran pengawasan Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kota Tarakan yang bersih dan akuntabel di masa datang.

Tim Penyusun LKIP
Inspektorat Kota Tarakan
Tahun 2026,



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| C. Aparat Pemerintah | 4 |
| D. Isu Strategis Inspektorat Kota Tarakan | 4 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| A. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tarakan | 10 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 12 |
| C. Indikator Kinerja Utama | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| A. Pengukuran Kinerja | 16 |
| B. Analisis Pengukuran Kinerja | 19 |
| C. Realisasi Anggaran..... | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 59 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Inspektorat Kota Tarakan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan :

1. Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan 2025-2029;
2. Rencana Kerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025; dan
3. Perjanjian Kinerja Perubahan II Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Kota Tarakan mempunyai fungsi:

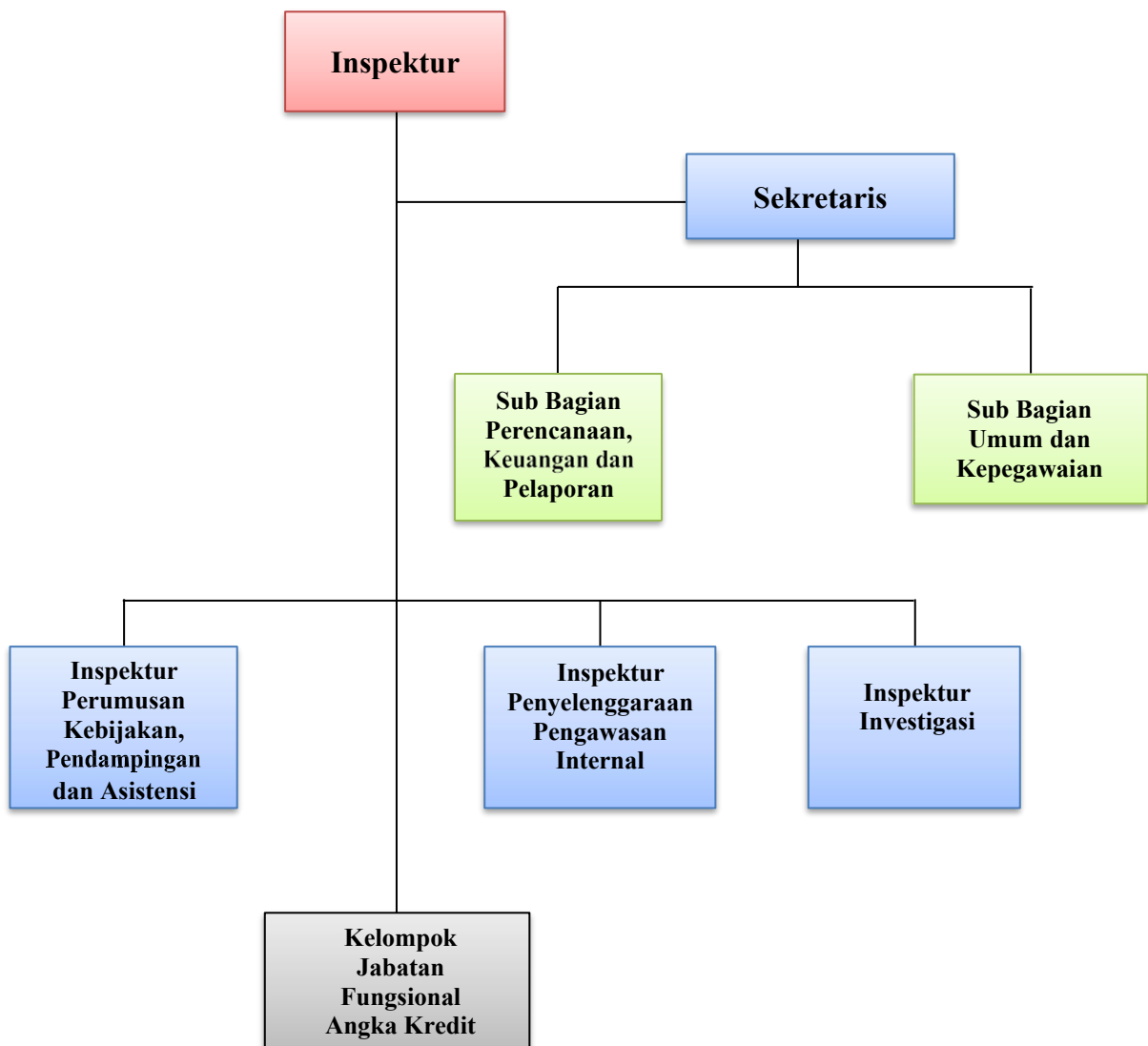
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Tarakan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- c. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- d. Inspektur Investigasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan





C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawas, maka Inspektorat Kota Tarakan wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tarakan.

Aparat Pemerintah yang ada di Inspektorat Kota Tarakan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kota Tarakan
Per Februari 2026

| NO | JABATAN | JUMLAH | L | P | SLTP | SLTA | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 |
|----|--|--------|----|----|------|------|----|----|----|----|----|
| 1 | Inspektur | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Sekretaris | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Inspektur Pembantu | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 4 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Auditor Madya | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 7 | PPUPD Madya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Auditor Muda | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 9 | PPUPD Muda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Auditor Pertama | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 11 | PPUPD Pertama | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 12 | Auditor Penyelia | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 13 | Auditor Pelaksana Lanjutan Mahir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Auditor Pelaksana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pelaksana | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
| | Total | 43 | 21 | 22 | - | - | 4 | - | 35 | 4 | - |

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat, 2026*

D. Isu Strategis Inspektorat Kota Tarakan

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan fokus utama bermuara pada satu isu strategis makro, yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan"**. Isu strategis ini menegaskan peran krusial Inspektorat sebagai katalisator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan, serta mempertimbangkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, telah diidentifikasi 5 (lima) permasalahan utama yang menjadi tantangan sekaligus fokus perbaikan kinerja pada periode ini, yaitu:

1. Belum efektifnya pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Pengawasan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat Perangkat Daerah masih perlu dioptimalkan. Pendampingan dan reviu yang lebih komprehensif diperlukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja Perangkat Daerah benar-benar selaras dengan target pembangunan Kota Tarakan dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

2. Belum efektifnya pengawasan keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan laporan keuangan entitas (Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, BUMD, hingga sekolah), masih memerlukan pengawasan internal yang lebih ketat. Hal ini mencakup upaya peningkatan kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan demi meminimalisasi risiko penyimpangan.

3. Belum tingginya integritas pemerintah daerah

Upaya pencegahan korupsi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan belum mencapai titik maksimal. Tantangan di area ini meliputi upaya peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), pemahaman manajemen risiko yang belum merata di semua Perangkat Daerah, serta perlunya dorongan masif agar Perangkat Daerah mampu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



4. Belum tingginya kapabilitas APIP

Meningkatnya beban kerja, perluasan cakupan pengawasan, serta tingginya ekspektasi publik terhadap pengaduan masyarakat (*Gratifikasi, Whistle Blowing System*, dll) belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas kelembagaan. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

5. Belum tingginya akuntabilitas kinerja Inspektorat

Sebagai instansi pengawas yang menjadi *role model* bagi Perangkat Daerah lain, Inspektorat Kota Tarakan dituntut untuk terus mengevaluasi dan membenahi tata kelola internalnya. Peningkatan akuntabilitas kinerja internal, optimalisasi serapan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi Inspektorat menjadi agenda penting yang harus diselesaikan secara berkesinambungan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Tarakan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

Dalam upaya merealisasikan kelima target penyelesaian permasalahan strategis di atas pada tahun 2025, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tarakan tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Analisis terhadap kondisi objektif ini dipetakan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal organisasi:

1. Faktor Internal (Kelemahan Organisasi):

Tantangan dari dalam organisasi yang secara langsung berdampak pada kecepatan dan kualitas pengawasan meliputi:

- Keterbatasan Kapasitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM): Ketersediaan SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun spesifikasi kemampuannya. Selain itu, kuantitas SDM tenaga fungsional umum yang bertugas menunjang operasional dan administrasi pengawasan juga belum tercukupi secara optimal.
- Keterbatasan Dukungan Sarana, Prasarana, dan Anggaran : Pelaksanaan tugas pengawasan yang komprehensif membutuhkan mobilitas dan instrumen kerja yang memadai. Saat ini, dukungan sarana, prasarana, serta alokasi anggaran penunjang pelaksanaan tugas pengawasan belum sepenuhnya proporsional dengan beban kerja yang ada.



2. Faktor Eksternal (Tantangan Lingkungan Pengawasan) :

Selain kendala internal, efektivitas pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh ekosistem tata kelola pada entitas yang diawasi (Perangkat Daerah), antara lain:

- **Meningkatnya Beban Kerja dan Ekspektasi Publik:**

Terdapat tren peningkatan beban kerja akibat perluasan cakupan pengawasan yang berjalan beriringan dengan tingginya ekspektasi publik terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat secara transparan dan cepat.

- **Pemahaman SPIP yang Belum Merata:**

Belum semua Perangkat Daerah menyadari sepenuhnya pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai alat mitigasi risiko sejak dini, sehingga pengawasan seringkali bersifat reaktif, bukan preventif.

- **Dinamika Organisasi pada Perangkat Daerah:**

Adanya kebijakan pergeseran atau mutasi pegawai di lingkungan Perangkat Daerah seringkali berdampak pada terhambatnya proses kelanjutan penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di instansi tersebut.

- **Kepatuhan Entitas yang Masih Rendah :**

Masih ditemukannya tingkat kepatuhan dan ketaatan yang belum optimal dari sebagian Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tarakan merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang diselaraskan dengan potensi sumber daya serta tantangan tata kelola yang dihadapi oleh daerah, dalam hal ini secara spesifik oleh Inspektorat Kota Tarakan. Sebagai landasan pijak yang baru, Renstra Inspektorat Kota Tarakan ini ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berpedoman pada pola pertanggungjawaban Kepala Daerah, sehingga arah kebijakan pengawasan selaras dengan masa jabatan pemerintahan yang berjalan. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa eksekusi program-program Inspektorat Kota Tarakan berjalan linear dengan visi pembangunan kota, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terukur dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Renstra Inspektorat Kota Tarakan secara khusus ditujukan untuk mengawal dan mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 telah melalui tahapan yang simultan dan terintegrasi dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan. Pendekatan partisipatif dikedepankan dengan melibatkan seluruh stakeholders strategis, mulai dari tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD hingga tahapan Forum Perangkat Daerah. Melalui mekanisme sinkronisasi ini, Renstra Inspektorat Kota Tarakan menjadi kristalisasi kesepakatan dan komitmen bersama antara Inspektorat, perangkat daerah lain, serta seluruh pemangku kepentingan di Kota Tarakan.



Untuk tataran implementasi, penjabaran dari sasaran strategis dalam Renstra tersebut dituangkan secara lebih teknis ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tarakan. Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun pelaksanaan. Di dalam Renja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 inilah, dimuat secara rinci program dan kegiatan prioritas pengawasan yang dieksekusi selama satu tahun kalender berjalan, yang sekaligus menjadi acuan utama dalam pengukuran target dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen ini.

Perencanaan strategis Inspektorat Kota Tarakan disusun untuk mendukung dan mengawal pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Adapun Visi Pemerintah Kota Tarakan yang menjadi komitmen bersama adalah:

"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan dan kelautan, serta ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Inspektorat Kota Tarakan secara spesifik mengemban amanah untuk mendukung pelaksanaan penjabaran Misi Daerah, yaitu:

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota."

Dalam kerangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tarakan berkontribusi langsung terhadap 3 (tiga) Sasaran Makro Kota, yang meliputi:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.



A. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tarakan

Untuk merespons isu strategis makro dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD di atas, Inspektorat Kota Tarakan menetapkan arah kebijakan yang terstruktur melalui penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis.

Pada periode Renstra 2025-2029 ini, Inspektorat menetapkan 1 (satu) Tujuan Strategis yang ditopang oleh 5 (lima) Sasaran Strategis, beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) pengukur keberhasilannya. Penjabaran tujuan, sasaran, indikator, beserta target kinerja tahun pertama (2025) disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan dan kelautan, serta ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR |
|---|--|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terwujudnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) |
| | | Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai) |
| | | Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Level MRI (Level) |
| | | Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda | Level IEPK (Level) |
| | | | Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM (%) |
| | | Meningkatnya kapabilitas APIP | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) |
| | | Meningkatnya tata kelola Inspektorat | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) |
| Nilai SAKIP PD (Nilai) | | | |

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2025



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan II Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025, serta dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|---------------------------|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai) | 14,73 |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Level MRI (Level) | 3 |
| 3 | Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda | Level IEPK (Level) | 3 |
| 4 | Meningkatnya kapabilitas APIP | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | Terintegrasi (Integrated) |
| 5 | Meningkatnya tata kelola Inspektorat | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 87.95 |
| | | Nilai SAKIP PD (Nilai) | 84.57 |

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2025

Untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja sasaran di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkan strategi melalui 3 (tiga) program kerja, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp15.358.512.705,00

Adapun program kerja tersebut tertuang pada tabel seperti di bawah ini:



Tabel 2.3
Program Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025

| SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM | PAGU |
|---|--|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | | |
| | Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja | Persentase tindaklanjut evaluasi SAKIP | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 235,930,000.00 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | | Level MRI | | |
| | Meningkatnya efektivitas pengendalian internal perangkat daerah | Persentase PD yang menerapkan manajemen risiko | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1,122,835,480.00 |
| | Meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP | Persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP oleh PD | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1,885,877,110.00 |
| | Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan auditor eksternal | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 599,240,000.00 |
| Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda | | Level IEPK | | |
| | | Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM | | |
| | Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi | Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Intervensi APIP | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 809,302,690.00 |
| | Meningkatnya komitmen PD dalam pembangunan Zona Integritas | Persentase PD yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI Nasional | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 117,206,100.00 |
| Meningkatnya kapabilitas APIP | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | |
| | Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas APIP | Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1,387,023,200.00 |
| | | Persentase pelaksanaan PKPT sesuai rencana dan tepat waktu | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan Quality Assurance (QA) serta pelayanan konsultasi | Survey kepuasan pelaksanaan pengawasan dan QA serta pelayanan konsultasi | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 550,437,000.00 |
| Meningkatnya tata kelola Inspektorat | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | |
| | | Nilai SAKIP PD | | |
| | Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja | Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6,332,225,723.00 |
| | Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2,318,435,402.00 |
| TOTAL ANGGARAN | | | | 15,358,512,705.00 |

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2025



C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai tingkat keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan periode 2025-2029. IKU ini ditetapkan sebagai parameter utama organisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama ini difokuskan pada indikator-indikator yang berorientasi pada hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*). Perumusannya didasarkan pada analisis logis mengenai sejauh mana pengaruh indikator tersebut terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penetapan IKU ini sekaligus menjadi wujud komitmen akuntabilitas Inspektorat Kota Tarakan dalam mendukung dan merealisasikan pencapaian target-target krusial yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029.



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tarakan

| Tujuan/Sasaran | IKU | Definisi Operasional/Formulasi | Satuan | Sumber Data |
|--|---|---|--------|--------------------------|
| Tujuan | | | | |
| Terwujudnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan | SPIP | Level SPIIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang diterbitkan oleh BPKP Formulasi : Hasil penilaian BPKP | Level | BPKP |
| Sasaran | | | | |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Evaluasi SAKIP Kota | Nilai komponen Evaluasi SAKIP Kota berdasarkan hasil evaluasi KemenpanRB Formulasi : Hasil penilaian KemenPANRB | Nilai | KemenPANRB |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Level MRI | Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko Formulasi : Hasil penilaian BPKP | Level | BPKP |
| Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda | Level IEPK | Tingkat efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BPKP. Formulasi : Hasil penilaian BPKP | Level | BPKP |
| | Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM | Unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Formulasi : $\text{Jumlah unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM} \div \text{Total unit kerja} \times 100\%$ | Persen | Inspektorat Kota Tarakan |
| Meningkatnya kapabilitas APIP | Level Kapabilitas APIP | Ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan intern secara efektif dan efisien. Level kapabilitas APIP terdiri dari: 1. Level 1 – Initial 2. Level 2 – Infrastructure 3. Level 3 – Integrated 4. Level 4 – Managed 5. Level 5 – Optimizing Formulasi : Level Kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh BPKP | Level | BPKP |
| Meningkatnya tata kelola Inspektorat | IKM | Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Inspektorat Formulasi : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Indeks | Inspektorat Kota Tarakan |
| | Nilai SAKIP | Nilai yang menunjukkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Tarakan Formulasi : Hasil penilaian Implementasi AKIP oleh Inspektorat | Nilai | LHE AKIP |

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi.. Pada tahun 2025, pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp15.358.512.705,00. Keseluruhan strategi pengawasan tersebut diimplementasikan secara konkret melalui 3 (tiga) program kerja, 11 (sebelas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub-kegiatan.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai Peringkat Kinerja

| No | Nilai Kinerja (%) | Predikat Kinerja |
|----|-------------------|------------------|
| 1 | $90 \geq 100$ | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 s/d <90 | Tinggi |
| 3 | 66 s/d <75 | Sedang |
| 4 | 51 s/d <65 | Rendah |
| 5 | 0 s/d <50 | Sangat Rendah |

Sumber : Permendagri 86/2017



Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025

| NO | SASARAN (TAHUNAN) - PK KEPALA PD | INDIKATOR (TAHUNAN) - IKI KEPALA PD | TARGET FINAL | REALISASI FINAL | CAPAIAN REALISASI FINAL |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -8 |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai) | 14.73 | 14.90 | 101.15% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Level MRI (Level) | 3 | 2,43 | 81.13% |
| 3 | Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemma | Level IEPK (Level) | 3 | 2,73 | 91.00% |
| 4 | Meningkatnya kapabilitas APIP | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | 100.00% |
| 5 | Meningkatnya tata kelola Inspektorat | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 87.95 | 87.95 | 100.00% |
| | | Nilai SAKIP PD (Nilai) | 84.57 | 84.57 | 100.00% |
| Rata-rata Capaian PK | | | | | 95,55% |

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2025

Hasil perhitungan penilaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang belum memenuhi harapan. Capaian kinerja melampaui target (di atas 100%) ditorehkan pada satu indikator utama. Pada sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencatatkan realisasi sebesar 14,90 melampaui target 14,73, dengan tingkat capaian tertinggi sebesar 101,15%.



Kedua, kinerja yang terealisasi secara presisi mencapai 100,00% terdapat pada sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat melalui indikator Nilai SAKIP perangkat daerah terealisasi sebesar 84,57 dari target 84,57, menghasilkan tingkat capaian sebesar 100,00%. Begitu pula untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Tarakan terealisasi sebesar 87,95 dari target 87,95 dengan tingkat capaian 100,00%.

Ketiga, pencapaian sasaran Meningkatnya kapabilitas APIP dengan menggunakan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan sampai dengan laporan ini disusun belum ada rilis dari BPKP. Hasil KAPIP Inspektorat Kota Tarakan dengan indikator Kapabilitas APIP pada Level 3 (Terintegrasi), masih sesuai dengan target yang diperjanjikan pada tahun ini.

Dua indikator lainnya mencatatkan capaian kinerja yang belum optimal dan tidak menyentuh angka maksimal pencapaian dikarenakan adanya perubahan regulasi penilaian dari BPKP. Perubahan regulasi evaluasi disampaikan di penghujung akhir tahun penilaian sehingga masih ada beberapa penilaian yg tidak dapat dipenuhi, Pencapaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) mencatatkan realisasi sebesar 2,43 belum melampaui target 3, dengan tingkat capaian sebesar 81,13%. Sementara itu, sasaran Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah daerah dengan indikator Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mencapai realisasi 2,73 dari target 3, dengan tingkat capaian sebesar 91,00%.

Secara keseluruhan, akumulasi dari nilai akhir Perjanjian Kinerja (PK) pada keenam indikator sasaran strategis tersebut menghasilkan rata-rata Capaian PK sebesar 95,55%.



B. Analisis Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan parameter utama untuk menilai sejauh mana efektivitas Inspektorat Kota Tarakan dalam menjalankan fungsi *quality assurance* dan *consulting* guna memastikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh Perangkat Daerah (PD). Pengukuran ini menjadi cerminan kualitas pengawasan internal dalam mendorong terciptanya budaya kinerja yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 14,73. Hingga akhir periode pengukuran, realisasi pencapaian indikator ini berhasil menyentuh angka 14,90. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 101,15%,

Tabel 3.3.
Capaian Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Pertama (2025)

| Indikator Sasaran | Baseline | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|---|----------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2024 | Target | Realisasi | | | |
| Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai) | 14.72 | 14.73 | 14.90 | 101,15% | 16.77 | 88.85% |

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2025



- **Perbandingan Historis (2024-2025):** Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (2024) yang berada pada skor 14,72, kinerja pada tahun ini menunjukkan peningkatan secara inkremental sebesar 0,18 poin.
- **Perbandingan Jangka Menengah (2025-2030):** Apabila diproyeksikan terhadap target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2030 yang mematok angka 16,77, capaian di tahun pertama ini telah merealisasikan 88,85% dari target jangka menengah tersebut. Progres ini menunjukkan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat (*on the right track*) untuk mencapai target akhir kualitas akuntabilitas kinerja daerah.

Analisis Keberhasilan dan Kendala

Pencapaian yang melampaui target ini merupakan hasil dari pelaksanaan program kerja rutin serta pemenuhan komitmen tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya. Faktor pendorong keberhasilan tersebut antara lain:

1. Penyelesaian seluruh (100%) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2025 secara tepat waktu.
2. Upaya pemenuhan standar kompetensi tim pemeriksa melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP guna mendukung kelancaran proses evaluasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi kualitatif dari Kementerian PANRB tahun 2025, masih ditemukan kendala substansial yang perlu diperhatikan. Evaluasi AKIP internal dinilai belum sepenuhnya mampu memotret progres atau kualitas implementasi SAKIP terbaru pada unit kerja. Catatan yang diberikan dalam LHE masih cenderung berfokus pada aspek pemenuhan administratif (*compliance*) dan belum mendalam pada aspek kualitas serta pemanfaatan kinerja secara *riil*.



Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bentuk perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*), Inspektorat Kota Tarakan menetapkan langkah-langkah strategis untuk tahun mendatang, yaitu:

1. Penyelarasan Fokus Evaluasi: Memastikan pelaksanaan Evaluasi AKIP internal menilai kualitas implementasi SAKIP yang paling baru/terkini pada unit kerja, sehingga catatan dan rekomendasi yang disampaikan tetap relevan untuk ditindaklanjuti.
2. Transformasi Kualitas LHE: Meningkatkan kedalaman analisis dalam evaluasi AKIP internal agar tidak hanya menyentuh aspek formalitas dokumen, tetapi juga memberikan solusi efektif terkait kualitas dan pemanfaatan SAKIP guna mendorong perbaikan implementasi di setiap Perangkat Daerah secara lebih optimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh 1 Program, 1 Kegiatan, dan 2 Sub-Kegiatan dengan rincian efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Analisis Sumber Daya Sasaran
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

| SASARAN | INDIKATOR | CAPAIAN | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PAGU | REALISASI | % |
|---|---|---------|--|--|----------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 101.15% | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase tindaklanjut evaluasi SAKIP | 235,930,000.00 | 167,565,000.00 | 71.02% |
| | | | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan hasil pemantauan kinerja yang tepat waktu | 235,930,000.00 | 167,565,000.00 | |
| | | | 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja | 26,860,000.00 | 26,860,000.00 | |
| | | | 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja | 209,070,000.00 | 140,705,000.00 | |



Berdasarkan data di atas, pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Terhadap pelaksanaan sasaran ini dinilai **Efisien** dan didapatkan nilai positif sebesar **29,78%**. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Tarakan berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan meskipun serapan anggaran hanya sebesar 71,02%, atau terdapat penghematan sumber daya sebesar 28,98% dari pagu yang tersedia.

Efisiensi tersebut didukung oleh pelaksanaan sub-kegiatan sebagai berikut:

1. **Sub-Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:** Menyerap anggaran secara penuh sebesar **100%** (Rp26.860.000,00) untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan Kinerja. Anggaran ini digunakan secara optimal guna melakukan pemeriksaan kinerja.
2. **Sub-Kegiatan Reviu Laporan Kinerja:** Menunjukkan tingkat penghematan yang signifikan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp140.705.000,00** atau **67,30%** dari pagu Rp209.070.000,00. Penghematan sebesar 32,70% pada sub-kegiatan ini terjadi tanpa mengurangi kualitas *output* reviu, yang membuktikan bahwa proses pendampingan dan penjaminan mutu akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih ekonomis melalui optimalisasi waktu dan tenaga auditor.



Evaluasi Penyelesaian Tindak
Lanjut LHE SAKIP PD

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Level Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Membangun budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh. Oleh karena itu, indikator Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) hadir sebagai instrumen strategis bagi Inspektorat Kota Tarakan untuk memotret sejauh mana tingkat kematangan Perangkat Daerah (PD) dalam mengidentifikasi, mengelola, serta memitigasi potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian sasaran pembangunan.

Komitmen terhadap penguatan manajemen risiko ini belum membuahkan hasil yang memuaskan pada tahun 2025. Dari target awal yang ditetapkan sebesar **Level 3**, realisasi maturitas risiko daerah hanya menembus skor **2,43**. Pencapaian yang belum sesuai ekspektasi ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar **81,13%**



Tabel 3.5.
Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Pertama (2025)

| Indikator Sasaran | Baseline | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2024 | Target | Realisasi | | | |
| Level MRI (Level) | 3 | 3 | 2,434 | 81,13% | 3 | 100,00% |

- **Perbandingan Historis (2024-2025):** Transisi kinerja dari tahun sebelumnya menunjukkan grafik pertumbuhan yang negatif. *Baseline* kematangan risiko pada tahun 2024 berada pada **Level 3,00**, menunjukkan penurunan sebesar 0,566 poin di tahun ini.
- **Perbandingan Jangka Menengah (2025-2030):** Rencana Strategis (Renstra) tahun 2030 mematok proyeksi capaian MRI maksimal di **Level 3**. Torehan skor 2,434 di tahun pertama ini menjadi indikasi bahwa target jangka menengah belum terpenuhi secara utuh, yaitu **kurang dari proyeksi awal (81,13%)**.

Analisis Keberhasilan dan Kendala

Capaian pada indikator masih perlu dorongan *proaktif* Inspektorat Kota Tarakan dalam menindaklanjuti berbagai catatan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Upaya perbaikan mulai diimplementasikan melalui pendesentralisasian Struktur Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah serta perluasan cakupan Bimbingan Teknis yang mulai menyentuh SDM di lini operasional.

Kendati demikian, hasil pemotretan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BPKP menggarisbawahi beberapa Area Perbaikan (*Area of Improvement*) yang masih membayangi tata kelola risiko daerah. Kemandirian Struktur Manajemen Risiko di internal Perangkat Daerah dinilai belum optimal, karena pelaksanaannya di lapangan masih sangat bergantung pada pendampingan dari Inspektorat. Selain itu, komitmen



pengendalian dari pimpinan instansi belum terbentuk secara penuh akibat belum ditetapkannya penerapan manajemen risiko sebagai salah satu indikator kinerja mutlak bagi Perangkat Daerah. Evaluasi ini juga menyoroti belum optimalnya langkah identifikasi dan mitigasi yang spesifik menasar pada risiko kecurangan (*fraud risk*).

Rencana Tindak Lanjut

Menyikapi celah tata kelola tersebut, Inspektorat Kota Tarakan merumuskan sejumlah intervensi strategis untuk dijalankan pada periode mendatang, antara lain:

1. **Akselerasi Kemandirian Struktur Risiko:** Mendorong setiap Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan fungsi Struktur Manajemen Risiko secara mandiri dan *proaktif*, sehingga intervensi Inspektorat dapat lebih difokuskan pada peran *quality assurance*.
2. **Integrasi Penilaian Kinerja:** Mengawal proses harmonisasi kebijakan daerah agar penerapan manajemen risiko segera ditetapkan sebagai komponen indikator kinerja wajib bagi seluruh Perangkat Daerah.
3. **Penguatan Fokus Mitigasi *Fraud*:** Meningkatkan intensitas pengendalian risiko kecurangan dengan menginstruksikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) *fraud* yang komprehensif, serta memantau efektivitas pelaksanaannya secara berkala di tiap unit kerja.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target Level MRI (Level 2,434) pada tahun 2025 telah didukung secara finansial oleh alokasi anggaran yang tersebar pada 2 Program, 4 Kegiatan, dan 8 Sub-kegiatan. Ringkasan penggunaan sumber daya untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:



Analisa Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

| SASARAN | INDIKATOR | CAPAIAN | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PAGU | REALISASI | % |
|--|-----------|---------|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Level MRI | 81,13% | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase PD yang menerapkan manajemen risiko | 1,122,835,480.00 | 764,433,083.00 | 68.08% |
| | | | 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase PD yang dievaluasi (manajemen risiko) | 252,426,140.00 | 146,335,462.00 | |
| | | | 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 252,426,140.00 | 146,335,462.00 | |
| | | | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | Persentase Indikator RB yang dievaluasi | 870,409,340.00 | 618,097,621.00 | |
| | | | 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 870,409,340.00 | 618,097,621.00 | |
| | | | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP oleh PD | 1,885,877,110.00 | 1,408,470,116.00 | 74.69% |
| | | | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan pengawasan yang tepat waktu | 1,090,135,080.00 | 842,480,187.00 | |
| | | | 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1,090,135,080.00 | 842,480,187.00 | |
| | | | 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 381,242,880.00 | 242,260,000.00 | |
| | | | 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 414,499,150.00 | 323,729,929.00 | |
| | | | 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 599,240,000.00 | 404,079,616.00 | 67.43% |
| | | | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan pemantauan tindak lanjut yang tepat waktu | 186,721,450.00 | 107,367,896.00 | |
| | | | 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 186,721,450.00 | 107,367,896.00 | |
| | | | 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase laporan pemantauan tindak lanjut (kasus) yang tepat waktu | 412,518,550.00 | 296,711,720.00 | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|----------------|--|
| | | | 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 176,901,200.00 | 161,204,370.00 | |
| | | | 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 235,617,350.00 | 135,507,350.00 | |

Pelaksanaan anggaran untuk pencapaian Level MRI dinilai **Efisien**. Berdasarkan perbandingan antara progres kinerja terhadap serapan dana, didapatkan margin efisiensi positif sebesar **11,96%** walaupun belum berhasil melampaui target indeks kematangan risiko daerah dengan serapan anggaran hanya sebesar 71,43%. Dengan kata lain, terdapat penghematan sumber daya sebesar 28,57% dari total pagu yang dialokasikan untuk pencapaian maturitas risiko.

Efisiensi tersebut dianalisis melalui dua peran kontribusi program sebagai berikut:

a. Dukungan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (Pendukung Utama)

Program ini memiliki keterkaitan substansi yang kuat karena penilaian maturitas MRI merupakan komponen integral dalam evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menjadi bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi (RB) secara umum.

- **Realisasi Anggaran:** Rp764.433.083,00 (Serapan **68,08%**).
- **Analisis:** Melalui Sub-kegiatan Pendampingan dan Penilaian RB serta Perumusan Kebijakan Teknis, Inspektorat melakukan asistensi dalam penguatan tata kelola organisasi dan budaya risiko di seluruh unit kerja. Serapan anggaran yang efisien pada kategori ini membuktikan bahwa strategi pendampingan dan penjaminan mutu maturitas SPIP/MRI dapat dijalankan secara optimal untuk mendorong kenaikan indeks tanpa memerlukan biaya operasional yang maksimal.



b. Dukungan Program Penyelenggaraan Pengawasan (Pendukung Penunjang)

Program ini memberikan dukungan teknis melalui fungsi pengawasan rutin guna memastikan bahwa mitigasi risiko telah diimplementasikan dalam tata kelola keuangan daerah.

- **Realisasi Anggaran:** Rp1.812.549.732,00 (Serapan **72,94%**).
- **Analisis:** Pencapaian maturitas risiko diperkuat oleh pelaksanaan berbagai sub-kegiatan operasional, seperti Pengawasan Keuangan, Reviu Laporan Keuangan, Kerja Sama Pengawasan, hingga Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP. Selain itu, sub-kegiatan Penanganan Kerugian Daerah dan Pengawasan Tujuan Tertentu bertindak sebagai instrumen mitigasi atas risiko-risiko teknis yang teridentifikasi di lapangan. Sinergi pengawasan ini memastikan bahwa standar manajemen risiko benar-benar teruji melalui praktek pemeriksaan harian.

Tingkat efisiensi sebesar 11,96% ini menegaskan penerapan prinsip *Value for Money*, di mana penguatan maturitas risiko melalui kerangka RB dan SPIP tetap berjalan selaras dengan disiplin pengawasan keuangan, dengan pemanfaatan anggaran yang hemat dan tepat sasaran.



Pengendalian Risiko Kecurangan
Rencana Tindak Pengendalian
(RTP) *Fraud*.



SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Sebagai representasi dari komitmen tersebut, Inspektorat Kota Tarakan menggunakan indikator Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) untuk mengukur sejauh mana kerangka kerja pencegahan, pendeteksian, dan penanganan korupsi telah terbangun dan terimplementasi dengan baik di seluruh instansi pemerintah daerah.

Sepanjang tahun 2025, upaya penguatan ekosistem antikorupsi tersebut belum menunjukkan hasil yang sangat impresif. Dari target capaian yang ditetapkan sebesar **Level 3**, Inspektorat Kota Tarakan hanya berhasil merealisasikan kematangan pengendalian korupsi pada angka **2,730**. Perolehan skor ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar **91,00%**.

Tabel 3.7.
Capaian Sasaran Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda Tahun Pertama (2025)

| Indikator Sasaran | Baseline | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2024 | Target | Realisasi | | | |
| Level IEPK (Level) | 2 | 3 | 2.730 | 91,00% | 3 | 100.00% |



- **Perbandingan Historis (2024-2025):** Evaluasi kinerja tahun ini mencatatkan lompatan kualitas yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2024 (*baseline*) kematangan pengendalian korupsi Kota Tarakan masih tertahan pada **Level 2**, pada tahun 2025 ini nilainya melesat tajam mendekati Level 3 (skor 2,730).
- **Perbandingan Jangka Menengah (2025-2030):** Rencana Strategis Inspektorat memproyeksikan target akhir kematangan IEPK pada tahun 2030 agar menetap secara ajek di **Level 3**. Capaian skor 2,730 di tahun pertama Renstra ini mengonfirmasi bahwa progres terhadap target jangka menengah telah terealisasi sebesar **91,00%**. Hal ini menempatkan organisasi dalam posisi yang sangat strategis untuk segera menyempurnakan sisa target perbaikan.

Analisis Keberhasilan dan Kendala

Penurunan nilai IEPK dari Level 3 menjadi 2,730 dikarenakan Inspektorat belum menginisiasi regulasi pengendalian kecurangan serta merutinkan identifikasi dan penilaian risiko korupsi pada unit-unit kerja. Langkah-langkah preventif ini secara bertahap mulai menumbuhkan kesadaran kolektif di lingkungan birokrasi.

Masih terdapat ketertinggalan poin sebesar 2,37 untuk memenuhi kriteria mutlak Level 3. Merujuk pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BPKP, belum maksimalnya capaian ini bermuara pada beberapa area perbaikan struktural, di antaranya:

- **Ketidaklengkapan Regulasi Operasional:** Standar Operasional Prosedur (SOP) antikorupsi yang tersedia saat ini masih berfokus pada langkah merespons kejadian (penindakan), dan belum memuat siklus tata kelola secara utuh yang mencakup aspek pencegahan, pendeteksian, dan respons.



- **Ekosistem Pembelajaran yang Belum Terstruktur:** Kegiatan edukasi atau pembelajaran antikorupsi masih bersifat incidental hanya dilaksanakan ketika terdapat agenda bersama dengan aparat pengawas eksternal (KPK, BPK, BPKP) dan belum menjadi budaya kerja yang dijadwalkan secara mandiri oleh tiap Perangkat Daerah.
- **Belum Optimalnya Saluran Pengaduan:** Pemanfaatan *Whistle Blowing System* (WBS) belum maksimal akibat kurangnya tingkat persepsi dan kepercayaan pegawai serta publik terhadap jaminan perlindungan pelapor.

Rencana Tindak Lanjut

Guna menutup celah kelemahan tersebut dan mengamankan capaian Level 3 di tahun berikutnya, Inspektorat Kota Tarakan menyusun rencana aksi strategis yang difokuskan pada :

1. **Penyempurnaan Kebijakan dan SOP:** Segera menyusun dan menetapkan SOP Pengendalian Kecurangan yang komprehensif, merangkum seluruh aspek pencegahan (*cegah*), pendeteksian (*deteksi*), dan penanganan dugaan (*respons*).
2. **Kemandirian Edukasi Antikorupsi:** Mendorong tiap Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran antikorupsi ke dalam jadwal pembinaan SDM internal secara berkala dan terstruktur.
3. **Optimalisasi dan Kampanye WBS:** Mengintensifkan kampanye dan sosialisasi pemanfaatan saluran pengaduan (WBS) secara masif, dengan penekanan pada edukasi mengenai kerahasiaan dan sistem perlindungan pelapor yang dijamin oleh pemerintah daerah.



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Memastikan setiap rupiah anggaran berkontribusi nyata terhadap penguatan integritas daerah merupakan inti dari analisis efisiensi pada sasaran ini. Upaya Inspektorat Kota Tarakan dalam menekan potensi korupsi sepanjang tahun 2025 didukung secara finansial oleh alokasi pada 1 Program, yang dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan dan 3 Sub-Kegiatan. Ringkasan penggunaan sumber daya untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Analisis Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda

| SASARAN | INDIKATOR | CAPAIAN | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PAGU | REALISASI | % |
|--|------------|---------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda | Level IEPK | 91.00% | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Intervensi APIP | 809,302,690.00 | 481,369,327.00 | 59.48% |
| | | | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | Jumlah program anti korupsi yang terlaksana (program) | 809,302,690.00 | 481,369,327.00 | |
| | | | 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 426,346,590.00 | 230,765,506.00 | |
| | | | 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 382,956,100.00 | 250,603,821.00 | |
| | | | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase PD yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI Nasional | 117,206,100.00 | 43,978,162.00 | 37.52% |
| | | | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | jumlah rekomendasi pencanganan PD | 117,206,100.00 | 43,978,162.00 | |
| | | | 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 117,206,100.00 | 43,978,162.00 | |



Jika membandingkan antara progres kinerja dengan serapan dana yang keluar, terdapat margin efisiensi positif sebesar **37,69%**. Angka ini memberikan gambaran bahwa Inspektorat mampu mengawal agenda antikorupsi hingga mendekati target maksimal (91,00%), namun dengan penggunaan anggaran yang sangat hemat, yakni sebesar 43,30% dari total pagu. Hal ini membuktikan bahwa strategi pencegahan korupsi yang diterapkan lebih mengedepankan optimalisasi fungsi pengawasan daripada pembiayaan operasional yang besar.

Keseimbangan efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kinerja pada sub-kegiatan berikut:

a. Intervensi Langsung Pencegahan Korupsi

Pilar utama pencegahan dilakukan melalui Sub-kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (0003) serta Penegakan Integritas (0004).

- Sub-kegiatan Pencegahan Korupsi menyerap Rp250.603.821,00 (65,44%) untuk membiayai koordinasi dan monitoring rutin.
- Di sisi lain, Sub-kegiatan Penegakan Integritas hanya memerlukan serapan sebesar 37,52% (Rp43.978.162,00).
- Rendahnya serapan pada aspek penegakan integritas ini menjadi indikasi positif bahwa pembangunan budaya jujur di lingkungan birokrasi dapat didorong melalui metode asistensi yang efektif tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang tersedia.



b. Penguatan Tata Kelola sebagai Penunjang

Di luar langkah preventif yang sifatnya spesifik, Inspektorat juga mengalokasikan dukungan melalui Sub-kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (0001).

- Realisasi pada sub-kegiatan ini tercatat sebesar Rp230.765.506,00 atau sekitar 54,13% dari pagu yang ada.
- Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan instrumen IEPK, pendampingan urusan daerah ini sangat krusial dalam menutup celah administrasi yang berisiko menjadi pintu masuk praktik korupsi di setiap Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, efisiensi sebesar 34,15% ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Tarakan telah menjalankan prinsip ekonomi dalam mencapai target kinerja integritas, di mana hasil yang maksimal tetap dapat diraih dengan pemanfaatan sumber daya yang cermat dan terukur.



Executive Workshop
Peningkatan IEPK dan Sinergi
Pencegahan Korupsi Pemda
Di Jakarta



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kapabilitas APIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)

Sebagai tulang punggung pengawasan di daerah, Inspektorat dituntut untuk tidak hanya menjadi *watchdog* (penjaga kepatuhan), tetapi juga harus mampu berperan sebagai konsultan yang memberikan nilai tambah (*value added*) bagi tata kelola organisasi. Oleh karena itu, indikator Kapabilitas APIP ditetapkan sebagai barometer utama untuk mengukur tingkat profesionalisme, kematangan, dan efektivitas Inspektorat Kota Tarakan dalam menjalankan peran *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (pendampingan).

Konsistensi mutu pengawasan ini berhasil dibuktikan pada tahun 2025. Dari target yang ditetapkan, yakni mempertahankan **Level 3 (Terintegrasi/Integrated)**, Inspektorat Kota Tarakan berhasil merealisasikannya secara presisi pada **Level 3**. Pencapaian absolut ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar **100,00%**.

Tabel 3.9.
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP Tahun Pertama (2025)

| Indikator Sasaran | Baseline | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2024 | Target | Realisasi | | | |
| Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | 100% | Terintegrasi (Integrated) | 100.00% |

Realisasi tahun 2025 masih menggunakan hasil realisasi tahun sebelumnya dikarenakan nilai KAPIP 2025 belum rilis oleh BPKP sampai dengan saat laporan ini dibuat



- **Perbandingan Historis (2024-2025):** Kinerja kelembagaan pada indikator ini menunjukkan stabilitas yang sangat solid. Inspektorat Kota Tarakan berhasil mempertahankan predikat Kapabilitas APIP pada Level 3, sama dengan capaian *baseline* pada tahun 2024. Mempertahankan level ini seringkali lebih menantang daripada mencapainya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa standar mutu pengawasan telah membudaya secara internal.
- **Perbandingan Jangka Menengah (2025-2030):** Rencana Strategis mengamanatkan agar kualitas Kapabilitas APIP dipertahankan pada **Level 3 (Terintegrasi)** hingga akhir periode perencanaan di tahun 2030. Dengan realisasi di level yang sama pada tahun ini, progres capaian terhadap target jangka menengah telah terpenuhi **100,00%**. Tugas organisasi ke depan bergeser dari sekadar "mengejar level" menjadi "memperkaya kualitas dan dampak" pengawasan.

Analisis Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan mempertahankan Level 3 ini merupakan bukti empiris bahwa praktik pengawasan intern pada Pemerintah Kota Tarakan telah berjalan secara terintegrasi dan memberikan dampak nyata. Validasi atas efektivitas ini turut dikonfirmasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui hasil evaluasi SPIP, yang secara eksplisit mengakui bahwa perwujudan peran APIP di Tarakan telah berjalan efektif. Sepanjang tahun 2025, hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Audit Kinerja, Reviu Manajemen Risiko, serta Evaluasi SAKIP lintas Perangkat Daerah yang dilakukan secara disiplin.

Meskipun secara metodologi dan dokumentasi kelembagaan telah memenuhi karakteristik Level 3, tantangan operasional (kendala) tetap ada. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan berbasis digital



menuntut peningkatan keahlian spesifik dari auditor. Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki spesifikasi keahlian khusus (seperti keahlian audit investigatif yang mendalam, atau audit berbasis teknologi informasi) menjadi area perbaikan berkelanjutan agar kualitas rekomendasi yang diberikan bisa semakin tajam dan adaptif terhadap risiko tata kelola modern.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan Kapabilitas APIP Level 3 ini tidak hanya bertahan di atas kertas tetapi terus meningkat dari sisi kualitas (*continuous improvement*), strategi tindak lanjut yang akan diimplementasikan meliputi :

1. **Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan:** Mendorong percepatan pemenuhan jam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis serta sertifikasi keahlian spesifik bagi para Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD, guna merespons kompleksitas pengawasan yang terus berkembang.
2. **Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis IT:** Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis pengawasan (mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit, hingga pemantauan tindak lanjut) agar proses *assurance* menjadi lebih efisien dan *real-time*.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mempertahankan standar mutu pengawasan pada Level 3 (Terintegrasi) merupakan prioritas yang didukung secara finansial melalui alokasi sumber daya pada dua pilar utama, yaitu pengembangan kompetensi SDM dan penyediaan perangkat kebijakan pengawasan. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:



Analisis Sumber Daya Sasaran Meningkatnya kapabilitas APIP

| SASARAN | INDIKATOR | CAPAIAN | PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR | PAGU | Realisasi | % |
|-------------------------------|--|---------|--|---|------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya kapabilitas APIP | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 100.00% | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan | 1,387,023,200.00 | 802,133,913.00 | 57.83% |
| | | | | Persentase pelaksanaan PKPT sesuai rencana dan tepat waktu | | | |
| | | | 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase APIP yang mengikuti ujian sertifikasi kompetensi | 1,387,023,200.00 | 802,133,913.00 | |
| | | | 6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1,387,023,200.00 | 802,133,913.00 | |
| | | | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Survey kepuasan pelaksanaan pengawasan dan QA serta pelayanan konsultansi | 550,437,000.00 | 505,871,665.00 | 57.83% |
| | | | 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase pengawasan dan QA sesuai SOP | 550,437,000.00 | 505,871,665.00 | |
| | | | 6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 550,437,000.00 | 505,871,665.00 | |

Jika meninjau hubungan antara dana yang terserap dengan hasil yang diraih, pelaksanaan sasaran ini berada pada tingkat yang **Sangat Efisien**. Berdasarkan penghitungan margin efisiensi, diperoleh nilai positif sebesar **32,49%**. Angka ini merefleksikan kemampuan Inspektorat Kota Tarakan dalam mempertahankan maturitas Kapabilitas APIP tetap di Level 3 meskipun serapan anggaran hanya mencapai 67,51%. Efisiensi ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas organisasi dapat dilakukan melalui manajemen kegiatan yang selektif dan berorientasi pada pemenuhan standar kompetensi inti.



Dukungan anggaran tersebut dijabarkan melalui analisis pada dua kategori berikut:

a. Kontribusi Langsung Pengembangan SDM

Pilar pertama difokuskan pada peningkatan kualitas personil melalui Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- **Realisasi Anggaran:** Rp802.133.913,00 (Serapan **57,83%**).
- **Analisis:** Penggunaan dana pada sub-kegiatan ini dialokasikan untuk membiayai diklat substantif, ujian sertifikasi, dan pengembangan kompetensi auditor maupun PPUPD. Rendahnya serapan anggaran (57,83%) di tengah capaian target 100% menunjukkan adanya optimalisasi metode pembelajaran, seperti pemanfaatan diklat daring atau PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang lebih ekonomis tanpa mengurangi validitas perolehan sertifikat kompetensi pegawai.

b. Kontribusi Fasilitas dan Perangkat Pengawasan

Pilar kedua memberikan dukungan melalui penyediaan regulasi dan alat kendali pengawasan pada Sub-kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.

- **Realisasi Anggaran:** Rp505.871.665,00 (Serapan **91,90%**).
- **Analisis:** Anggaran ini digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan teknis dan operasional yang menjadi prasyarat dalam penilaian maturitas kapabilitas APIP. Serapan yang cukup tinggi dan selaras dengan capaian output menunjukkan bahwa dukungan administratif dan metodologi kerja telah dikelola secara proporsional guna menjamin peran *assurance* dan *consulting* APIP berjalan sesuai standar yang ditetapkan.



Secara kolektif, tingkat efisiensi sebesar 32,49% ini memberikan konfirmasi bahwa Inspektorat Kota Tarakan telah berhasil mengimplementasikan prinsip *Value for Money*, di mana kualitas pengawasan internal yang tinggi dapat terus dipertahankan melalui penggunaan anggaran yang hemat, terukur, dan tepat guna.



Kegiatan Studi Tiru atas Metode Baru Penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat DI Yogyakarta



Kegiatan Pengembangan Informasi Awal Dalam Rangka Evaluasi atas Efektifitas Peningkatan Kapabilitas APIP Daerah Inspektorat Kota Tarakan bersama BPKP

SASARAN STRATEGIS 5 :



Meningkatnya tata kelola Inspektorat

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD

Untuk meningkatkan tata kelola, Inspektorat Kota Tarakan melakukan beberapa pencapaian dengan meningkatkan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Tarakan.

1. Indikator Kinerja Utama 5

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh Inspektorat Kota Tarakan. Fokus pengukuran ini mencakup perspektif Perangkat Daerah maupun masyarakat umum terhadap kualitas layanan pendampingan (*consulting*), proses pemeriksaan, serta penanganan pengaduan publik.

Pada tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar **87,95**. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, realisasi indeks yang dicapai berada pada angka **87,95**. Perolehan ini secara matematis menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar **100,00%**.

Tabel 3.11.
Capaian Sasaran Meningkatnya tata kelola Inspektorat Tahun Pertama (2025)

| Indikator Sasaran | Baseline | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|--|----------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2024 | Target | Realisasi | | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat PD (Indeks) | 0 | 87.95 | 87.95 | 100.00% | 88.05 | 100.00% |



- **Perbandingan Historis (2024-2025):** Mengingat pengukuran IKM baru menetapkan *baseline* (dengan nilai 0) pada tahun 2024, perolehan skor 87,95 pada tahun 2025 ini menjadi capaian awal yang positif dalam menetapkan standar mutu pelayanan instansi ke depannya.
- **Perbandingan Jangka Menengah (2025-2030):** Target akhir Rencana Strategis (Renstra) memproyeksikan indeks kepuasan layanan di angka **88,05** pada tahun 2030. Dengan realisasi di tahun pertama ini, progres terhadap capaian target jangka menengah tersebut telah terpenuhi sebesar **99,88%**. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan yang berjalan saat ini sudah terarah dan selaras dengan target akhir.

Analisis Keberhasilan dan Kendala

Tingginya nilai IKM ini mencerminkan persepsi yang baik dari pengguna layanan. Berdasarkan komponen survei kepuasan yang dibagikan, tingginya angka tersebut ditunjang oleh penilaian positif responden terhadap kemudahan prosedur, kejelasan spesifikasi layanan, serta kompetensi dan keramahan petugas dalam memberikan layanan konsultasi maupun pendampingan.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya menjaga konsistensi mutu layanan dan melakukan perbaikan secara bertahap, rencana tindak lanjut yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Peningkatan Kecepatan dan Kepastian Waktu Pelayanan
2. Penguatan Kompetensi dan Budaya Pelayanan Prima
3. Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung secara operasional oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini bersifat rutin untuk memastikan kelancaran layanan administrasi dan ketersediaan sarana prasarana kantor. Rincian penggunaan anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Analisis Sumber Daya Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat

| SASARAN | INDIKATOR | CAPAIAN | PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR | PAGU | Realisasi | % |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|--|------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya tata kelola Inspektorat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100,00% | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 2,318,435,402.00 | 1,537,601,120.00 | 66.32% |
| | | | 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 53,580,000.00 | 44,100,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 53,580,000.00 | 44,100,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | |
| | | | 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 790,007,550.00 | 336,970,822.00 | |
| | | | 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5,476,500.00 | 4,694,700.00 | |
| | | | 6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 70,054,500.00 | 45,527,250.00 | |
| | | | 6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 17,352,100.00 | 6,910,243.00 | |
| | | | 6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 16,081,300.00 | 13,980,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 681,043,150.00 | 265,858,629.00 | |
| | | | 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD yang terinput dalam e-BMD | 1,122,531,190.00 | 896,437,892.00 | |
| | | | 6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| | | | 6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 176,290,930.00 | 117,972,500.00 | |
| | | | 6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 946,240,260.00 | 778,465,392.00 | |
| | | | 6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia | 142,969,052.00 | 110,057,276.00 | |
| | | | 6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5,000,000.00 | 1,200,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 137,969,052.00 | 108,857,276.00 | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|----------------|--|
| | | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| | | | 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | 209,347,610.00 | 150,035,130.00 | |
| | | | 6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4,288,300.00 | 3,059,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 133,714,310.00 | 87,473,130.00 | |
| | | | 6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 45,805,000.00 | 44,143,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 25,540,000.00 | 15,360,000.00 | |

Secara umum, pelaksanaan dukungan anggaran untuk sasaran ini dinilai Efisien. Berdasarkan perbandingan antara capaian output dengan serapan dana, didapatkan margin efisiensi positif sebesar 33,68%. Angka ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Tarakan mampu menjaga mutu layanan publik pada tingkat kepuasan yang baik meskipun serapan anggaran pendukung hanya sebesar 66,32%. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan kebutuhan operasional rutin dapat dikendalikan dengan prinsip kehematan tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah.



Pelayanan Konsultansi dan Jasa Advice



2. Indikator Kinerja Utama 6

Nilai SAKIP PD

Memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja di "rumah sendiri" adalah kewajiban mutlak bagi sebuah instansi pengawas. Melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD), Inspektorat Kota Tarakan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen kerjanya secara internal. Hal ini sekaligus menjadi bentuk kepatuhan organisasi dalam mempertanggungjawabkan capaian kerjanya sebelum menjalankan fungsi pengawasan pada unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Pada tahun 2025, target Nilai SAKIP internal Inspektorat dipatok pada angka **84,57**. Hingga akhir tahun pelaporan, realisasi capaian berhasil menyentuh skor **84,57**. Perolehan ini secara akumulatif menghasilkan persentase capaian sebesar **100,00%**, yang menandakan bahwa target yang dijanjikan telah terpenuhi dengan sangat baik.

Tabel 3.13.
Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Tahun Pertama (2025)

| Indikator Sasaran | Baseline | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2024 | Target | Realisasi | | | |
| Nilai SAKIP PD (Nilai) | 80.26 | 84.57 | 84.57 | 100,00% | 86 | 100.00% |

- **Perbandingan Historis (2024-2025):** Bergerak dari *baseline* tahun 2024 yang berada pada skor **80,26**, capaian tahun ini menunjukkan grafik perbaikan yang nyata. Kenaikan nilai ini utamanya ditopang oleh penataan dokumentasi dan perbaikan alur pelaporan kinerja yang lebih rapi dan terpusat.



- **Perbandingan Jangka Menengah (2025-2030):** Jika merujuk pada target akhir Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2030 yakni sebesar **86**, realisasi skor 84,57 di tahun ini membuktikan bahwa capaian terhadap target jangka menengah telah terpenuhi sebesar **98,34%**.

Analisis Keberhasilan dan Kendala

Faktor utama pendorong peningkatan nilai SAKIP tahun ini adalah transisi pengelolaan kinerja ke arah digitalisasi melalui aplikasi SAKIP Pro. Implementasi sistem ini memaksa pendisiplinan administrasi pegawai, mulai dari penyusunan Pohon Kinerja (Pokin), *cascading* sasaran, hingga tahapan pengunggahan bukti pendukung (*evidence*). Hasilnya, pengelolaan dokumen kinerja kini menjadi sepenuhnya terpusat di dalam satu sistem. Hal ini tidak hanya mempermudah proses evaluasi dan penelusuran data, tetapi juga menjamin transparansi serta rekam jejak pelaporan yang lebih tertib.



Digitalisasi Pengelolaan Kinerja
Aplikasi SAKIP Pro

Meskipun secara perolehan nilai telah melampaui target, pemotretan kondisi di lapangan (yang juga sejalan dengan catatan evaluasi Kementerian PANRB) memperlihatkan beberapa kendala teknis operasional yang masih harus dibenahi secara internal :



1. **Ambiguitas Formula di Level Indikator Kegiatan** : Saat ini, rumusan definisi operasional dan formula perhitungan indikator kinerja untuk level Pejabat Administrator (Eselon III) memang telah terinput dengan baik di aplikasi SAKIP Pro. Namun, formulasi indikator yang dikawal oleh Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Fungsional belum seluruhnya dirumuskan secara spesifik dan terinput ke dalam sistem. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap cara perhitungan maupun makna capaian di level pelaksana.
2. **Kedisiplinan Pengukuran Berkala**: Pengukuran kinerja periodik secara berjenjang belum dilaksanakan secara konsisten. Masih dijumpai kelemahan kedisiplinan dari pegawai dalam melaporkan progres capaian triwulanan secara tepat waktu di aplikasi SAKIP Pro. Akibatnya, sistem belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai alat pantau kinerja yang *real-time*.

Rencana Tindak Lanjut

Menyikapi catatan tersebut serta merujuk pada Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) LHE SAKIP Internal, langkah perbaikan yang akan dieksekusi pada periode mendatang meliputi:

1. **Penetapan Formula Kinerja Individu**: Menginstruksikan setiap level jabatan, secara khusus pada Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Fungsional, untuk segera merumuskan definisi operasional dan formula perhitungan indikatornya secara spesifik, serta memastikan seluruhnya terinput ke dalam aplikasi SAKIP Pro. Tujuannya agar realisasi data yang ditarik bebas dari bias dan kekeliruan interpretasi pengumpulan data.



2. **Peningkatan Disiplin Evaluasi Berkala:** Mendisiplinkan dan memantau rutinitas pengisian capaian kinerja triwulanan di SAKIP Pro secara berjenjang mulai dari pimpinan hingga tingkat staf pelaksana. Pembiasaan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang internal, agar pengisian SAKIP tidak lagi dianggap sebagai sekadar beban pelaporan akhir tahun, melainkan sebagai instrumen harian untuk mendeteksi hambatan kinerja secara lebih dini.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk mencapai standar akuntabilitas kinerja internal (Nilai SAKIP PD) dikelola melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini bersifat rutin dan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran manajemen perencanaan, pelaporan kinerja, serta tertib administrasi keuangan organisasi. Rincian penggunaan anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Analisis Sumber Daya Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat

| SASARAN | INDIKATOR | CAPAIAN | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PAGU | REALISASI | % |
|--------------------------------------|----------------|---------|---|--|------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya tata kelola Inspektorat | Nilai SAKIP PD | 100.00% | 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti | 6,332,225,723.00 | 5,575,848,824.00 | 88.06% |
| | | | 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu | 8,040,000.00 | 5,400,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | | | 6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| | | | 6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| | | | 6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| | | | 6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| | | | 6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|------------------|--|
| | | | 6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 4,040,000.00 | 3,000,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP | 6,324,185,723.00 | 5,570,448,824.00 | |
| | | | 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 6,254,369,723.00 | 5,505,432,824.00 | |
| | | | 6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 69,816,000.00 | 65,016,000.00 | |
| | | | 6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| | | | 6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

Secara agregat, pelaksanaan dukungan anggaran untuk sasaran ini berada pada kategori *Efisien*. Berdasarkan perbandingan antara progres output kinerja terhadap serapan dana, diperoleh margin efisiensi positif sebesar 11,94%. Hal ini merefleksikan kemampuan Inspektorat Kota Tarakan dalam memenuhi target akuntabilitas internal yang melampaui target (100,00%) dengan realisasi anggaran sebesar 88,06%. Mengingat porsi anggaran terbesar pada program ini dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak pegawai (Gaji dan Tunjangan) serta biaya operasional rutin, tingkat serapan tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan riil organisasi.



C. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran pada Inspektorat Kota Tarakan tahun 2025 merupakan perwujudan dari dukungan finansial dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, total pagu anggaran (DPA) yang dikelola adalah sebesar Rp15.358.512.705,00. Dari total alokasi tersebut, realisasi penyerapan dana sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai Rp11.691.350.826,00 atau setara dengan 76,12% dari seluruh pagu yang tersedia. Secara keseluruhan, realisasi penyerapan dana kumulatif adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Laporan Konsolidasi Inspektorat Tahun 2025

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | BIAYA MENURUT DPA (Rp.) | TARGET FISIK (%) | REALISASI | | REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.) | SISA DANA (Rp.) |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | FISIK (%) | KEU. (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD | 15,358,512,705.00 | 100.00 | 93.56 | 76.12 | 11,691,350,826.00 | 3,667,161,879.00 |
| 6.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10,037,684,325.00 | 100.00 | 95.48 | 78.86 | 7,915,583,857.00 | 2,122,100,468.00 |
| 6.01.01.2.01.0 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8,040,000.00 | 100.00 | 100.00 | 67.16 | 5,400,000.00 | 2,640,000.00 |
| 6.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 |
| 6.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 |
| 6.01.01.2.01.08 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 4,040,000.00 | 100.00 | 100.00 | 74.26 | 3,000,000.00 | 1,040,000.00 |
| 6.01.01.2.02.0 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6,324,185,723.00 | 100.00 | 95.58 | 88.08 | 5,570,448,824.00 | 753,736,899.00 |
| 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6,254,369,723.00 | 100.00 | 95.53 | 88.03 | 5,505,432,824.00 | 748,936,899.00 |
| 6.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 69,816,000.00 | 100.00 | 100.00 | 93.12 | 65,016,000.00 | 4,800,000.00 |
| 6.01.01.2.05.0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,440,603,200.00 | 100.00 | 90.34 | 58.74 | 846,233,913.00 | 594,369,287.00 |
| 6.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 53,580,000.00 | 100.00 | 100.00 | 82.31 | 44,100,000.00 | 9,480,000.00 |
| 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1,387,023,200.00 | 100.00 | 89.97 | 57.83 | 802,133,913.00 | 584,889,287.00 |
| 6.01.01.2.06.0 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 790,007,550.00 | 100.00 | 98.71 | 42.65 | 336,970,822.00 | 453,036,728.00 |
| 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,476,500.00 | 100.00 | 100.00 | 85.72 | 4,694,700.00 | 781,800.00 |
| 6.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63,422,000.00 | 100.00 | 91.58 | 63.83 | 40,483,940.00 | 22,938,060.00 |
| 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6,632,500.00 | 100.00 | 100.00 | 76.04 | 5,043,310.00 | 1,589,190.00 |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 17,352,100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.82 | 6,910,243.00 | 10,441,857.00 |
| 6.01.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 16,081,300.00 | 100.00 | 90.80 | 86.93 | 13,980,000.00 | 2,101,300.00 |
| 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 681,043,150.00 | 100.00 | 99.50 | 39.04 | 265,858,629.00 | 415,184,521.00 |
| 6.01.01.2.07.0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,122,531,190.00 | 100.00 | 100.00 | 79.86 | 896,437,892.00 | 226,093,298.00 |
| 6.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 176,290,930.00 | 100.00 | 100.00 | 66.92 | 117,972,500.00 | 58,318,430.00 |
| 6.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 946,240,260.00 | 100.00 | 100.00 | 82.27 | 778,465,392.00 | 167,774,868.00 |
| 6.01.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 142,969,052.00 | 100.00 | 87.67 | 76.98 | 110,057,276.00 | 32,911,776.00 |
| 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5,000,000.00 | 100.00 | 90.00 | 24.00 | 1,200,000.00 | 3,800,000.00 |
| 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 137,969,052.00 | 100.00 | 87.58 | 78.90 | 108,857,276.00 | 29,111,776.00 |
| 6.01.01.2.09.0 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 209,347,610.00 | 100.00 | 96.65 | 71.67 | 150,035,130.00 | 59,312,480.00 |
| 6.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4,288,300.00 | 100.00 | 100.00 | 71.33 | 3,059,000.00 | 1,229,300.00 |
| 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 133,714,310.00 | 100.00 | 94.76 | 65.42 | 87,473,130.00 | 46,241,180.00 |
| 6.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25,540,000.00 | 100.00 | 100.00 | 60.14 | 15,360,000.00 | 10,180,000.00 |
| 6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 45,805,000.00 | 100.00 | 100.00 | 96.37 | 44,143,000.00 | 1,662,000.00 |
| 6.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 2,721,047,110.00 | 100.00 | 86.09 | 72.77 | 1,980,114,732.00 | 740,932,378.00 |



| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 6.01.02.2.01.0 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 2,308,528,560.00 | 100.00 | 84.16 | 72.92 | 1,683,403,012.00 | 625,125,548.00 |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 26,860,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26,860,000.00 | 0.00 |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1,090,135,080.00 | 100.00 | 85.13 | 77.28 | 842,480,187.00 | 247,654,893.00 |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | 209,070,000.00 | 100.00 | 67.31 | 67.30 | 140,705,000.00 | 68,365,000.00 |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | 381,242,880.00 | 100.00 | 67.09 | 63.54 | 242,260,000.00 | 138,982,880.00 |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | 414,499,150.00 | 100.00 | 100.00 | 78.10 | 323,729,929.00 | 90,769,221.00 |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 186,721,450.00 | 100.00 | 94.70 | 57.50 | 107,367,896.00 | 79,353,554.00 |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 412,518,550.00 | 100.00 | 96.93 | 71.93 | 296,711,720.00 | 115,806,830.00 |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 176,901,200.00 | 100.00 | 96.68 | 91.13 | 161,204,370.00 | 15,696,830.00 |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 235,617,350.00 | 100.00 | 97.11 | 57.51 | 135,507,350.00 | 100,110,000.00 |
| 6.01.03. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2,599,781,270.00 | 100.00 | 93.95 | 69.07 | 1,795,652,237.00 | 804,129,033.00 |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 802,863,140.00 | 100.00 | 97.05 | 81.24 | 652,207,127.00 | 150,656,013.00 |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 252,426,140.00 | 100.00 | 95.52 | 57.97 | 146,335,462.00 | 106,090,678.00 |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 550,437,000.00 | 100.00 | 97.75 | 91.90 | 505,871,665.00 | 44,565,335.00 |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | 1,796,918,130.00 | 100.00 | 92.57 | 63.63 | 1,143,445,110.00 | 653,473,020.00 |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 426,346,590.00 | 100.00 | 95.57 | 54.13 | 230,765,506.00 | 195,581,084.00 |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 870,409,340.00 | 100.00 | 93.89 | 71.01 | 618,097,621.00 | 252,311,719.00 |
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 382,956,100.00 | 100.00 | 94.91 | 65.44 | 250,603,821.00 | 132,352,279.00 |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 117,206,100.00 | 100.00 | 64.25 | 37.52 | 43,978,162.00 | 73,227,938.00 |

Secara umum, anggaran tersebut dialokasikan pada tiga pilar utama dengan ikhtisar penggunaan sebagai berikut:

- **Dukungan Operasional dan Administrasi (Program Penunjang):** Menyerap anggaran sebesar Rp7.915.583.857,00 (78,86%) yang difokuskan pada pemenuhan gaji, tunjangan ASN, operasional rutin kantor, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- **Aktivitas Pengawasan Internal (Program Penyelenggaraan Pengawasan):** Merealisasikan dana sebesar Rp1.980.114.732,00 (72,77%) untuk membiayai kegiatan audit kinerja, pengawasan keuangan daerah, reviu laporan keuangan, serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- **Kebijakan dan Asistensi (Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi):** Terealisasi sebesar Rp1.795.652.237,00 (69,07%) untuk mendukung penguatan tata kelola melalui asistensi Manajemen Risiko (MRI), Reformasi Birokrasi (RB), serta pencegahan korupsi (IEPK).

Tingkat penyerapan sebesar 76,12% menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan. Sisa anggaran yang ada merupakan bentuk



kehematan operasional dan optimalisasi tenaga internal dalam pelaksanaan tugas, di mana seluruh sasaran kinerja tetap dapat tercapai secara maksimal tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi dana yang tersedia. Hal ini menegaskan komitmen Inspektorat dalam menerapkan prinsip *Value for Money*, yaitu mencapai hasil kerja yang direncanakan dengan pemanfaatan anggaran yang hemat dan tepat guna.

BAB IV

P E N U T U P

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam siklus pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Capaian pada tahun ini menjadi fondasi dan tolak ukur awal bagi keberhasilan pengawalan tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Secara umum, hasil pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), menunjukkan tren pencapaian yang sangat memuaskan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rata-rata kinerja Inspektorat Kota Tarakan pada tahun 2025 mencapai angka **95,55%**. Pencapaian yang belum melampaui target (di atas 100%) ini menempatkan Inspektorat Kota Tarakan pada kategori predikat kinerja "**Sangat Tinggi**".
- b) Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga didukung oleh pengelolaan anggaran yang proporsional. Rata-rata capaian serapan anggaran Inspektorat Kota Tarakan pada tahun 2025 adalah sebesar **76,12%** dengan kategori **Efisien**.

Meskipun secara angka (kuantitatif) target kinerja tahun pertama ini telah terlampaui dengan predikat Istimewa, proses evaluasi tetap menemukan beberapa celah pelaksanaan yang harus disempurnakan. Adapun hal-hal strategis yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas kinerja Inspektorat Kota Tarakan pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Substansi Evaluasi Kinerja (AKIP):** Menggeser fokus pendampingan dan evaluasi AKIP internal pada Perangkat Daerah (PD) dari sekadar pemenuhan dokumen administratif (*compliance*) menjadi evaluasi yang menilai kualitas implementasi dan pemanfaatan SAKIP secara riil, sehingga rekomendasi yang diberikan lebih tajam dan solutif.

2. **Optimalisasi Pemanfaatan SAKIP Pro:** Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SAKIP Pro tidak hanya sebagai sarana pengarsipan dokumen kinerja, tetapi diinternalisasi sebagai alat kendali (pengawasan) harian bagi pimpinan dalam memantau capaian *outcome* organisasi secara berjenjang.
3. **Akselerasi Kematangan Manajemen Risiko dan Pengendalian Korupsi:** Mengintensifkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, khususnya mendorong kemandirian Struktur Manajemen Risiko di masing-masing PD serta mengoptimalkan efektivitas saluran pengaduan (WBS) untuk mencapai karakteristik IEPK Level 3 secara paripurna.
4. **Penguatan Kapabilitas APIP Secara Berkelanjutan:** Meningkatkan pemenuhan kompetensi spesifik (sertifikasi teknis) bagi para Auditor dan P2UPD agar kualitas *assurance* (pengawasan) dan *consulting* (pendampingan) kepada Perangkat Daerah maupun BUMD semakin adaptif terhadap risiko tata kelola modern.